



PERBEKEL DESA YEHEMBANG KANGIN  
KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA YEHEMBANG KANGIN  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA YEHEMBANG KANGIN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat II dalam wilayah daerah – daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 );
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemebrhentian Perangkat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 );
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Pemerintahan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6 );
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia No 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2015, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934 );
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 691);
18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 692);
19. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga dan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 694);
20. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2019 Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 44 Tahun 2020 tentang Tunjangan Hari Raya untuk Perbekel, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 44);
22. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 59);
23. Peraturan Desa Yehembang Kangin Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020-2025, (Lembaran Desa Yehembang Kangin Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Yehembang Kangin Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Yehembang Kangin Tahun 2020 Nomor 9);

25. Peraturan Desa Yehembang Kangin Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Yehembang Kangin Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YEHEMBANG KANGIN  
KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA  
DAN

PERBEKEL DESA YEHEMBANG KANGIN  
KECAMATAN MENDOYO, KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA YEHEMBANG KANGIN TAHUN ANGGARAN 2021

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.785.390.790,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.351.000.508,07
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 797.996.250,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 1.300.861.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 41.584.950,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 383.708.800,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.875.152.008,07</u>
Surplus/Defisit	Rp. (89.761.218,07)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 89.761.218,07
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 89.761.218,07
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Yehembang Kangin  
Pada tanggal : 26 Januari 2022

PERBEKEL DESA YEHEMBANG KANGIN,

**I Gede Suardika**

Diundangkan di : Desa Yehembang Kangin  
Pada tanggal : 26 Januari 2022

SEKRETARIS DESA YEHEMBANG KANGIN,

**I Gede Agus Diantara**

LEMBARAN DESA YEHEMBANG KANGIN TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN I :

PERATURAN DESA YEHEMBANG KANGIN NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021